

KETERLIBATAN ULAMA DAN *ULEEBALANG* DALAM PERISTIWA PERANG CUMBOK DI ACEH: 1945-1946

Tiara Rohadatul Mahabbah

Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Semarang

tiararm02@students.unnes.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk membahas gerakan revolusi kemerdekaan di Aceh, tepatnya pada peristiwa Perang Cumbok di Aceh yang terjadi pada akhir tahun 1945 dan awal tahun 1946. Tulisan ini meliputi kedudukan ulama dan *uleebalang* di Aceh, keadaan Aceh setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, serta terjadinya peristiwa Perang Cumbok di Aceh. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan tahapan heuristik/mengumpulkan sumber, verifikasi/kritik sumber, interpretasi/penafsiran kembali, dan historiografi/penulisan sejarah. Dari artikel ini, kita dapat mengetahui bahwa kedudukan ulama dan *uleebalang* pada saat revolusi kemerdekaan di Aceh sangatlah penting. Kelompok tersebut juga tidak hanya berperan dalam masalah agama, tetapi juga berperan dalam bidang sosial dan politik yang mampu menyelesaikan berbagai konflik di Aceh. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dua kekuatan ini berselisih dan menimbulkan suatu pertentangan sosial di Aceh dan melahirkan suatu peristiwa penting, yaitu Perang Cumbok. Dalam artikel ini dijelaskan proses terjadinya Perang Cumbok yang dilatarbelakangi oleh kondisi sosial, kondisi pemerintahan, dan kondisi politik yang menegang. Peristiwa tersebut melahirkan revolusi sosial dan politik di Aceh yang dimenangkan oleh kelompok ulama.

Kata Kunci: Ulama, *Uleebalang*, Aceh, Perang Cumbok, Revolusi Sosial.

PENDAHULUAN

Revolusi merupakan kejadian penting yang terjadi di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia dengan membawa perubahan-perubahan besar dalam kehidupan sosial dan politik. Revolusi juga dimaknai sebagai perubahan yang berlangsung cepat dan bersifat fundamental (Uddin dkk, 2020). Hal ini ditandai dengan kejadian ketidakpuasan, konflik sosial, dan

pertentangan kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya (Suwirta, 2015). Revolusi tidak semua dialami oleh bangsa-bangsa di dunia dalam menemukan jati dirinya. Revolusi tersebut nantinya memunculkan corak-corak narasi seperti karya sejarah, seni, sastra, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, revolusi menjadi suatu perjalanan dan perjuangan yang sangat penting tidak hanya di lingkup nasional, namun banyak daerah yang melibatkan diri dalam peristiwa revolusi ini.

Revolusi di Indonesia berlangsung pada kurun waktu 1945-1950 dan mengalami pergolakan politik yang besar. Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 belum menjadikan Indonesia sebagai negara yang resmi berdaulat, tetapi memerlukan proses yang panjang untuk mencari identitas, mewujudkan asa dan cita-cita bangsa untuk lepas dari cengkraman bangsa asing (Pratama, 2018). Revolusi kemerdekaan di Indonesia terjadi di berbagai daerah seperti Aceh, Kuningan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan lain sebagainya.

Revolusi kemerdekaan di Indonesia diawali dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, peristiwa ini proklamasi menjadi tonggak yang penting bagi bangsa Indonesia. Proklamasi juga dijadikan sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya dan menciptakan rangkaian-rangkaian panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya (Rihardi, 2017). Dengan demikian, hal inilah yang menjadi cikal bakal revolusi kemerdekaan di Indonesia dan melahirkan perjuangan-perjuangan baru dalam rangka menegaskan kedaulatan negara.

Makna revolusi tersebut berkaitan erat dengan peristiwa yang terjadi di Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1945-1949 yang melahirkan peristiwa Cumbok pada 1945-1946. Provinsi Aceh merupakan daerah yang berbentuk kerajaan pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada awal revolusi kemerdekaan, Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah dari karesidenan Provinsi Sumatera yang

dibentuk pada 3 Oktober 1945. Pada masa kolonial Belanda dan Jepang, Banda Aceh yang sekarang disebut sebagai Kutaraja, sedangkan pada masa sebelum pendudukan Jepang Karesidenan Aceh dinamakan *Afdeeling* dan *Onderafdeeling* dengan kepala pemerintahannya yaitu Asisten Residen dan kepala wilayah (*Controleur*). Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, terdapat *uleebalang* yang memerintah Aceh secara turun-temurun. Setelah terjadi revolusi sosial pada tahun 1946, status istimewa di Aceh dihapuskan.

Dalam perkembangannya selama revolusi kemerdekaan, Aceh berkedudukan sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah melewati berbagai perubahan. Pada tahun 1947 Karesidenan Aceh berada di bawah daerah administratif Sumatera Utara. Pada saat itu, Sumatera Utara dibagi ke dalam tiga wilayah, diantaranya adalah Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Pada Agustus 1947, wilayah Aceh bersamaan dengan Tanah Karo dan Kabupaten Langkat ditetapkan menjadi daerah militer yang dipimpin oleh Gubernur Militer.

Pada tahun 1948 wilayah administratif Sumatera Utara dinaikkan statusnya menjadi Provinsi Sumatera Utara yang membawahi tiga karesidenan yaitu Sumatera Timur, Karesidenan Aceh, dan Tapanuli. Pada saat itu, Kutaraja menjadi ibu kota dari Karesidenan Aceh, Sumatera Utara, Tanah Karo, dan Kabupaten Langkat. Hal ini menjadikan Kutaraja juga sebagai pusat kegiatan administrasi pemerintahan sipil militer Sumatera Utara. Hingga pada Agustus 1949 Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan mengfungsikan kembali daerah otonomi di Karesidenan Aceh.

Provinsi Daerah Istimewa Aceh sejak tanggal 26 Mei 1959 disebut dengan "daerah istimewa". Letak geografis Aceh berada di ujung barat laut Pulau Sumatera dengan perbatasan di utara adalah Selat Malaka, di selatan dan barat adalah Samudera Indonesia, sedangkan di timur berbatasan dengan Selat Malaka. Wilayahnya terdiri dari delapan

kabupaten dan dua kotamadya, diantaranya yaitu Kabupaten Aceh Besar dengan ibukota Banda Aceh, Kabupaten Pidie dengan ibukota Sigli, Kabupaten Aceh Utara dengan ibukota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Barat dengan ibukota Meulaboh, Kabupaten Aceh Timur dengan ibukota Langsa, Kabupaten Aceh Tengah dengan ibukota Takengon, Kabupaten Aceh Selatan dengan ibukota Tapaktuan, Kabupaten Aceh Tenggara dengan ibukota Kutacane, sedangkan kotamadya yaitu Kota Sabang dan Kota Banda Aceh yang juga menjadi ibukota Daerah Istimewa Aceh.

Pada masa revolusi kemerdekaan di Aceh dikenal dengan gejolak sosial dan politik yang menunjukkan perjalanan perjuangan sejarah Aceh serta memunculkan tokoh-tokoh yang memiliki peranan selama masa revolusi Indonesia (Satriya dkk, 2019). Salah satu dari peristiwa revolusi Aceh adalah Perang Cumbok yang melibatkan dua kelompok besar di Aceh yaitu para ulama dan *uleebalang* yang tidak mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Salah satu peristiwa revolusi kemerdekaan di Aceh adalah terjadinya peristiwa Perang Cumbok pada tahun 1945-1946. Hal ini membuat keadaan Aceh gonjang-ganjing saat itu. Keadaan tersebut timbul dan memunculkan dua kekuatan besar di Aceh yaitu kelompok ulama yang tergabung dalam PUSA dengan kelompok *uleebalang*. Pertentangan dan perselisihan yang terjadi diantara keduanya tidak bisa dihindari dan menjadi konflik besar di Aceh.

Permasalahan yang dijadikan fokus utama dalam penulisan artikel ini adalah “Bagaimanakah peristiwa Perang Cumbok dapat terjadi di masa revolusi Kemerdekaan Indonesia?” dengan menjelaskan berbagai sub bab yaitu kedudukan ulama dan *uleebalang* di Aceh, keadaan Aceh setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, serta peristiwa Perang Cumbok yang terjadi pada tahun 1945-1946.

METODE

Dalam penyusunannya, artikel ini menggunakan metode sejarah, diantaranya adalah heuristik/mengumpulkan sumber, verifikasi/kritik sumber, interpretasi/penafsiran kembali, dan historiografi/penulisan sejarah. Pada tahapan heuristik mulau dilakukan penemuan dan penghimpunan sumber melalui buku dan artikel jurnal yang mendukung penulisan sejarah suatu peristiwa. Tahapan kritik sumber yaitu meneliti secara kritis dengan menghubungkan antara judul yang telah dibuat dengan penelitian terdahulu agar relevan. Tahapan interpretasi yaitu menafsirkan makna dari suatu peristiwa sejarah. Tahapan historiografi yaitu merekonstruksi peristiwa masa lampau ke dalam sebuah tulisan yang menjadi kisah sejarah (Herlina, 2020).

PEMBAHASAN

Kedudukan Ulama dan *Uleebalang* di Aceh

Ulama berasal dari bahasa Arab yaitu “alim” yang artinya “orang yang mengetahui” (Abdullah, 1983). Dalam struktur masyarakat Aceh, ulama tidak hanya memegang peranan dalam bidang sosial dan agama, namun juga dalam bidang politik. Di Aceh, ulama disebut juga “Teungku” yang menjarah mencari ilmu keluar dari kampung halamannya agar nantinya dapat mengikat persaudaraan di lingkungan sekitarnya. Ulama juga disebut sebagai *warasatul anbiya* atau pewaris para nabi dalam mengajarkan dan menyebarkan ilmunya (Muhammaddar, 2014). Oleh karena itu di Aceh, ulama berperan sebagai guru di dalam masyarakat serta ulama juga berperan dalam penyelesaian konflik-konflik di Aceh.

Ulama dijadikan sebagai pemimpin perubahan dan dikenal sebagai tokoh terkemuka di Aceh yang membentuk organisasi PUSA (Persatuan Ulama-Ulama Seluruh Aceh) pada tahun 1939. Dalam hal ini, ulama juga mendirikan sekolah-sekolah atau madrasah sebagai tempat untuk menuntut ilmu agama yang bersifat tradisional.

Uleebalang atau hulubalang dalam bahasa Indonesia adalah seorang pemimpin, pasukan, atau laskar. *Uleebalang* selain menjadi panglima tentara juga mempunyai tugas yaitu memimpin sebuah kabupaten atas menerima kekuasaan langsung dari Sultan. Oleh karena itu, *Uleebalang* disebut sebagai pembantu Sultan untuk memimpin sebuah daerah. *Uleebalang* banyak melakukan perdagangan dan selalu mengontrol barang ekspor dan impor. Banyak juga dari mereka yang mengambil untung sebesar-besarnya dan merugikan Bandar Aceh (Hasbullah, 2015). Oleh karena itu, hal inilah yang membuat kedudukan *uleebalang* di Aceh menjadi sangat kuat. Di sisi lain, kedudukan *uleebalang* sebagai administrator di zaman kolonial juga yang menjadikan mereka sebagai sasaran kebencian rakyat Aceh (Daud, 2001).

Masyarakat Aceh membutuhkan kehadiran dan kebijaksanaan dari kedua kelompok tersebut, baik ulama maupun *uleebalang*. Namun di samping itu semua, hubungan antara masyarakat dan ulama lebih kuat dibandingkan hubungan masyarakat dengan *uleebalang*. Hal ini terlihat dari tindakan *uleebalang* yang jarang memimpin dan jarang memperhatikan masyarakat Aceh. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, banyak *uleebalang* yang sibuk mementingkan urusan pribadinya dalam hal perdagangan (Muhammadar, 2014).

Keadaan Aceh Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kondisi politik di Aceh pasca Proklamasi sangat mempengaruhi terjadinya peristiwa Perang Cumbok. Pada masa pemerintahan Belanda saat masyarakat Aceh menentang kekuasaan kolonial, Belanda memainkan peran adat lewat perantara *uleebalang*. Pihak *uleebalang* juga secara terang-terangan menentang Kemerdekaan Indonesia.

Dalam usahanya, Belanda melakukan politik pasifikasi. Politik pasifikasi merupakan untuk menarik simpati rakyat Aceh. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Belanda dengan kebijakan meningkatkan kecerdasan

rakyat terutama dari kelompok *uleebalang* agar bersedia menghentikan perlawanannya. Selain itu, terdapat juga perjanjian yang berisi bahwa Belanda memperlakukakan *uleebalang* untuk menjauhkan kelompok ulama dari rakyat (Hajriansyach, 2019). Menjaga *uleebalang* sebagai elite sosial di Indonesia dipandang memberikan keuntungan yang besar bagi Belanda. Menurut Amin (1998) dalam Muhajir (2018), kelompok *uleebalang* yang patuh terhadap Belanda kemudian diangkat menjadi *zelfbestuurder* yang diberikan gaji dan keistimewaan lainnya yang membuat citra mereka menjadi sangat eksklusif di mata masyarakat.

Kemajuan sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda dianggap membuat rugi sekolah agama yang didirikan oleh PUSA dan menimbulkan kondisi politik yang semakin rumit sejak penjajahan Belanda di Aceh. Hal ini juga yang membuat adanya permusuhan antara ulama dan *uleebalang*. Dengan demikian, Belanda menggunakan politik *divide et impera* untuk memisahkan kekuatan ulama dan *uleebalang*. Namun hal ini tidak membuat rakyat Aceh berhenti untuk melawan Belanda.

Jepang yang pada saat itu menjajah Indonesia melakukan politik untuk mendekati rakyat dari berbagai golongan, mulai dari kalangan ulama, bangsawan, dan lain sebagainya. Pada bulan Juni 1945 para petinggi Jepang menghubungi para pemuda yang ada di Kutaraja, salah satunya adalah Tuanku Hasyim. Dalam pertemuan ini, Jepang menekankan bahwa *Dai Nippon* pasti akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Beberapa hari kemudian, Tuanku Hasyim diminta oleh *Atcjeh Syu Seityo*, Matsubushi untuk mengadakan rapat pemuda yang dilaksanakan pada 14 Agustus 1945. Rapat dilaksanakan di Atjeh Bioskop Kutaraja dan dihadiri oleh pemuda yang pada saat itu sudah mengetahui bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu yang terlihat dengan tidak hadirnya *Syu Tjokan*. Rapat juga dihadiri oleh pemimpin Aceh yaitu Teuku Nyak Arief, Teuku Mohd, dan Daud Beureuh.

Pada tanggal 23 Agustus 1945 dilakukan pembicaraan antara pemimpin rakyat dengan Tjokan S. Lino tanpa diketahui publik. Hingga

pada tanggal 25 Agustus 1945 Tjokan S. Lino mengeluarkan maklumat kepada seluruh rakyat Aceh tentang adanya perdamaian antara Dai Nippon dengan Sekutu yang dijelaskan berdasarkan maklumat *Soematera Saikosikikan Kakka* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983). Dalam maklumat tersebut juga dijelaskan bahwa perang Asia Timur Raya sudah berakhir, serta *Dai Nippon* melakukan perdamaian dengan Amerika, Inggris, Cina, dan Rusia. *Tjokan* juga berterima kasih atas bantuan rakyat Aceh.

Maklumat yang dikeluarkan ini menyebar ke seluruh penjuru Aceh dan rakyat Aceh mengetahui keadaan nyata yang terjadi saat itu. Berita proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 juga terlambat diterima di Aceh. Di Kutaraja berita tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia baru diketahui pada tanggal 21 Agustus 1945 melalui para pemuda yang bekerja di kantor pemerintahan Jepang dan yang bekerja pada kantor surat kabar lokal *Atjeh Simbun*. Hal ini juga menyebabkan timbulnya keraguan-keraguan pada sebagian masyarakat Aceh. Hingga pada akhir Agustus dan awal September 1945 berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia telah meluas ke berbagai pelosok daerah Aceh.

Setelah diterimanya berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, para pemuda di Aceh juga ikut menaikkan bendera merah putih di depan Kantor Aceh Simbun, namun mengalami kegagalan karena diketahui oleh pejabat Jepang yang bernama H. Nagatmusu (Talsya, 1990). Penarikan bendera akhirnya dilakukan di Kutaraja dan sekitarnya. Hingga awal Oktober 1945 bendera merah putih telah berkibar di kota-kota seluruh Aceh, seperti Bireun, Sigli, Lhokseumawe, Idi, Langsa, Meulaboh, Kutacane, Kuala Simpang, dan lain sebagainya.

Setelah Indonesia merdeka, perjuangan sudah bukan lagi tentang merebut kebebasan, namun juga mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam prosesnya muncul berbagai macam hambatan dan ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasal dari pergolakan peristiwa yang mempengaruhi

keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia, salah satunya adalah di daerah Aceh.

Peristiwa Perang Cumbok di Aceh Tahun 1945-1946

Peristiwa ini terjadi pada tanggal 4 Desember 1945 di Sigli, Kabupaten Pidie. Peristiwa ini terjadi antara kelompok ulama yang kontra dengan kelompok *uleebalang*. Cumbok diambil dari nama suatu desa di Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, Aceh Utara. Kepala daerah di Cumbo disebut dengan *uleebalang* Cumbok yang bergelar Teuku Sari Muda Pahlawan Bintara dan pimpinan Cumbok yang dikenal dengan Teuku Daud Cumbok (Hajriansyach, 2019).

Pada tanggal 22 Oktober 1945, kelompok *uleebalang* di daerah Pidie mengadakan sebuah pertemuan di kediaman Teuku Keumangan Umar, Beureunun. Dalam pertemuan itu dibahas mengenai masalah yang menyangkut kedudukan kelompok *uleebalang*. Untuk menghadapi ancaman tersebut, mereka membentuk organisasi yang diberi nama Markas *Uleebalang* dengan barisan ketentaraan yaitu Barisan Penjaga Keamanan (BPK). BPK dikelompokkan menjadi tiga kesatuan, yaitu Barisan Cap Bintang yang bertugas menghadapi perlawanan dari rakyat yang menentang *uleebalang*, Barisan Cap Sauh yang bertugas menangani keuangan, dan Barisan Cap Tumbak yang bertugas menangkap pemimpin yang melawan gerakan mereka. Markas ini berada di Lammeulo yang dipimpin oleh Teuku sari Muda Pahlawan Bintara dan Teuku Daud Cumbok.

Kondisi politik di Pidie mulai memanas saat Teuku Daud Cumbok dan kelompok *uleebalang* lainnya meminta agar senjata Jepang yang berada di Sigli diambil alih oleh kelompok *uleebalang*, padahal Jepang belum menyerahkan senjatanya pada masyarakat Sigli. Di samping itu, Jepang menyerahkannya kepada Relyblik Indonesia yang didominasi oleh PUSA. Selain itu, barisan rakyat terutama PRI juga memasuki kota Sigli untuk mencegah jatuhnya senjata ke kelompok Markas *Uleebalang*. Untuk

menghindari perselisihan yang lebih besar, pihak TKR memohon agar Jepang mau menyerahkan senjatanya kepada mereka, namun permohonan dari TKR ini ditolak oleh Jepang.

Pada akhirnya Jepang menyerahkan senjatanya ke Markas *Uleebalang*. Hal ini menyebabkan pecahnya suatu pertempuran yang menelan banyak korban sejak tanggal 4 sampai 6 Desember 1945. Pemimpin rakyat, pemimpin daerah, dan TKR di bawah kekuasaan Kolonel Syamaun Gaharu, Mayor Teuku A. Hamid Azwar berusaha untuk menghentikan pertempuran. Pertempuran dapat dihentikan tanggal 6 Desember 1945. Kedua belah pihak diminta pergi dari Kota Sigli, sedangkan senjata yang berada di tangan Markas *Uleebalang* diserahkan kepada TKR dan dibawa ke Kutaraja.

Pada tanggal 9 Desember 1945, Teuku Muhammad Hasan selaku Gubernur Sumatera datang ke Kota Sigli. Di samping itu, kelompok PUSA melaporkan kepada Teuku Hasan mengenai kelompok yang anti republik. Pada akhirnya, Teuku Hasan menyanggupi permohonan PUSA untuk memberhentikan bupati Pidie dan digantikan dengan Cik Muhammad Said yaitu seorang *uleebalang*, namun bersifat nasionalis (Kurniawati, 2008).

Pada tanggal 10 Desember 1945, Markas *Uleebalang* mengadakan pertemuan kembali di kediaman Teuku Laksamana Umar. Pertemuan ini membahas agar Markas *Uleebalang* harus lebih tegas lagi untuk menindaklanjuti para pemimpin yang menghalangi jalan mereka. Hingga pada tanggal 16 Desember 1945 BPK menembak kampung-kampung di Lueng Putu dan Metareum yang menjadi pusat kekuatan lawan mereka, yaitu para pemuda terutama dari PRI.

Para pemuda yang keberadaannya terancam mulai membentuk organisasi Markas Besar Rakyat Umum (MBRU) dan mengepung markas BPK di Lammeulo. Kelompok *uleebalang* juga mengerahkan tenaganya untuk melakukan serangan-serangannya tanggal 30-31 Desember 1945. Pada 30 Desember 1945, BPK mulai melancarkan serangannya ke pusat kediaman PUSA/PRI di Metareuem. Situasi yang semakin mencekam ini

membuat pemerintah daerah mengeluarkan ultimatum, diantaranya: 1) pemerintah Aceh akan menyatakan bahwa kelompok *uleebalang* merupakan penghianat dan musuh Republik Indonesia, 2) pemerintah Aceh menuntut agar senjata yang digunakan *uleebalang* harus diserahkan sebelum 10 Januari 1945. Namun, ultimatum ini ditolak oleh *uleebalang* yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara kelompok ulama dengan kelompok *uleebalang*.

Situasi yang semakin tidak kondusif di Pidie menyebabkan Markas Umum Perjuangan dan Pertahanan Rakyat Daerah Aceh mengadakan sidang pertama pada tanggal 6 Januari 1946 untuk membahas situasi yang sedang terjadi di Aceh. Setelah itu dilanjutkan dengan sidang yang kedua pada tanggal 8 Januari 1946. Markas Umum Daerah Aceh akhirnya mengeluarkan maklumat yang berisi bahwa Markas *Uleebalang* sudah membuat perlawanan dan kerusuhan serta mereka adalah musuh tanah air. Maklumat tersebut juga berisi ultimatum kepada *uleebalang* untuk mengentikan perlawanannya mulai tanggal 10 Januari 1946, pukul 12 siang.

Maklumat dan ultimatum tersebut tidak dihiraukan oleh kelompok Markas *Uleebalang*. Akhirnya pada tanggal 12 Januari 1946, TKR yang didukung oleh MBRU mulai melakukan tindakan dengan membersihkan Markas *Uleebalang* di perkotaan-perkotaan, seperti Meureudu, Beureunun, Leungputu, dan lain sebagainya. Pada tanggal 13 Januari 1946, TKR berhasil menghancurkan Markas *Uleebalang*. Hingga pada 16 Januari 1946, Teuku Daud Cumbok berhasil ditangkap oleh TKR. Mereka dibawa ke Sanggeue untuk diadili dan dieksekusi.

Dengan demikian peristiwa Perang Cumbok ini dapat berakhir. Hal ini juga menandai berhentinya sistem *uleebalang* di Aceh. Kekuasaan di Aceh akhirnya beralih pada kelompok ulama yang memenangkan perang tersebut. Dampaknya yaitu dilengserkannya *uleebalang* dari jabatannya dan digantikan dengan ulama-ulama atau anggota PUSA serta

pengikutnya. Hal inilah yang menjadi akhir dari revolusi sosial di Aceh pada tahun 1945-1946.

KESIMPULAN

Revolusi merupakan suatu kejadian yang membawa perubahan-perubahan baik sosial maupun politik. Revolusi kemerdekaan di Indonesia diawali dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Makna revolusi tersebut berkaitan erat dengan peristiwa yang terjadi di Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1945-1949 yang melahirkan peristiwa Cumbok pada 1945-1946, serta adanya keterlibatan kelompok ulama dan *uleebalang*. Di Aceh, ulama berkedudukan sebagai guru serta ulama yang juga berperan dalam penyelesaian konflik di Aceh dan membentuk organisasi PUSA, sedangkan *uleebalang* merupakan panglima tentara yang diberi tugas oleh Sultan untuk memimpin daerah Kabupaten. Setelah peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Aceh, muncul keraguan-keraguan yang melahirkan ancaman dan hambatan terhadap keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah peristiwa Perang Cumbok yang berlangsung dari akhir 1945 sampai awal 1946. Pertempuran ini berkaitan dengan kedudukan ulama dan *uleebalang* dalam struktur sosial di Aceh. Peristiwa ini berakhir dan dimenangkan oleh kelompok *nulama* yang melahirkan revolusi sosial dan politik di Aceh.

Daftar Pustaka

- Abdullah, T. (1983). Agama dan Perubahan Sosial. Jakarta: Rajawali.
- Daud, S. (2001). Revolusi Sosial Aceh: Polarisasi Politik Ulama-Uleebalang 1945-1949. Disertasi. Program Studi Sejarah Peradaban Islam Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. (1983). *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta.
- Hajriansyach, T. (2019). Perang Cumbok Di Aceh Pada 1945-1946. *Ilmu Sejarah-S1*, 4(6).
- Hasbullah. (2015). *Uleebalang: Dari Kesultanan Hingga Revolusi Sosial (1514-1946)*. Aceh: BPNB Banda Aceh.
- Herlina, N. (2020). *Metode Sejarah*.
- Kurniawati, K. (2008). Perang Cumbok Dan Gerakan Tentara Perjuangan Rakyat (TPR) Di Aceh (Desember 1945 Maret 1946). *Jurnal Sejarah Lontar*, 5(2), 20-34.
- Muhajir, A. (2018). Langkah Politik Belanda di Aceh Timur: Memahami Sisi Lain Sejarah Perang Aceh, 1873-1912. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(2), 160-171.
- Muhammaddar, M. (2014). *Kedudukan Ulama dan Uleebalang sebagai elit sosial politik Aceh (1900-1946)*. Tesis. Program Studi Pemikiran Islam Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Pratama, R. A. (2018). Kecamuk Revolusi Kemerdekaan di Kuningan (1947-1950). *Jurnal Candrasangkala*, 4(2), 94-106.
- Rinardi, H. (2017). Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 2(2), 143-150.
- Satriya, B., Suwirta, A., & Santosa, A. B. (2019). Ulama Pejuang dari Serambi Mekkah: Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Peranannya dalam Revolusi Indonesia di Aceh, 1945-1950. *INSANCITA*, 4(1), 35-54.
- Suwirta, A. (2015). Memaknai Peristiwa Sumpah Pemuda dan Revolusi Kemerdekaan Indonesia dalam Perspektif Pendidikan. *Sipatahoenan*, 1(1).

Talsya, T, A. (1990). *Perjuangan Kemerdekaan di Aceh*. Lembaga Sejarah Aceh.

Uddin, B., Harnoko, D., Nurhajarini, D. R., Fibiona, I., & Ibrahim, J. (2020). Masyarakat Pedesaan dan Revolusi Kemerdekaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinbud DIY.